



Pemkab Landak Serahkan LHP-BPK Dana Bantuan Parpol



DISKOMINFO KABUPATEN LANDAK

SERAHKAN LHP - Bupati Landak, Karolin Margret Natasa menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas Pertanggung Jawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2024 kepada pengurus partai politik di Aula Kantor Bupati Landak, Rabu (28/5).

LANDAK, SP - Dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) dari APBD Tahun Anggaran 2024 dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak tidak didapati adanya temuan signifikan atas pengelolaan dana bantuan tersebut. Penilaian ini tertuang dalam



Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Pemkab Landak menyerahkan LHP BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas Pertanggung Jawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2024, sekaligus Evaluasi Laporan Pertanggung Jawaban Banparpol APBD Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Aula Kantor Bupati Landak, Rabu (28/5).

Laporan tersebut diserahkan langsung Bupati Landak Karolin Margret Natasa disertai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Landak Heri Adiwijaya, Ketua DPRD Landak Herculanus Heriadi, Kepala Kesbangpol Kabupaten Landak Samsul Bahri dan 10 perwakilan pimpinan parpol yang menerima bantuan dana parpol dari APBD Tahun Anggaran 2024.

Bupati Karolin mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI kepada 10 parpol, dimana

hasil pemeriksaan tersebut tidak didapati adanya temuan signifikan atas pengelolaan dana bantuan, dimana hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan dalam mempertanggung jawabkan penerimaan dan pengeluaran dana parpol yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 secara administrasi telah memadai dan sesuai dengan kriteria yang berlaku.

"Sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kabupaten Landak telah melaksanakan kewajibannya dan telah memberikan bantuan. Kita sudah diperiksa oleh BPK RI, dan sudah saya terima untuk hasil pemeriksaan Kabupaten Landak. Puji Tuhan, tahun kembali mendapatkan WTP untuk ke-12 kalinya, tentunya ini tidak terlepas dari kerja kita bersama," jelas Karolin.

Bupati Karolin berpesan kepada parpol yang menerima dana hibah bantuan untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas serta akuntabilitas dari anggaran yang diberikan.

"Dalam hal ini, tujuan memberikan dana kepada partai politik

untuk memastikan adanya pendidikan politik bagi masyarakat. Maka dana bansos untuk parpol, tidak boleh untuk membangun kantor partai," tegasnya.

Bupati Karolin berharap agar anggaran dana yang diberikan dapat digunakan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Karolin juga meminta kepada perwakilan parpol yang hadir agar dapat bersinergi dengan Pemkab Landak dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Landak Samsul Bahri menyampaikan bahwa dana bantuan parpol tahun 2024 mencapai Rp1.839.808.000.

"Kami mengingatkan kepada partai politik untuk penggunaan bangpol ini minimal adalah 60 persen untuk pendidikan politik, 40 persen untuk administrasi," jelasnya.

Samsul Bahri menambahkan, untuk pendidikan politik sendiri yang telah direkap Kesbangpol Landak dari laporan 10 parpol,

hanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya mencakup lokakarya, workshop. Sedangkan dari Pemendagri yang ada dikatakan Samsul Bahri kegiatan dapat mencakup seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarah sehan, workshop dan kegiatan politik lainnya.

"Presentase 10 partai yang digunakan untuk pendidikan politik ada yang melebihi dari minimal 60 persen tadi ada yang mencapai 77 persen seperti dari PDI Perjuangan, artinya sudah melebihi dari minimal yang lain masih rata-rata 60-67," jelas Samsul Bahri.

Selanjutnya, dikatakan Samsul Bahri pada tahun 2025 penyaluran bantuan dana parpol mencapai Rp1.886.680.000 dari total sembilan parpol.

"Bulan Juni sudah bisa kita salurkan, SK kemarin sudah ditandatangani ibu Bupati, artinya partai sudah siap mengajukan proposal untuk pencairan untuk bangpol ini. Paling lambat minggu pertama Desember untuk menyampaikan SPJ ke Kesbangpol," pinta Samsul Bahri. (rls)